



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : LEGISLATIF

LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

UNIT KERJA : FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANSARI MUHAMMAD**
2. Jabatan : **ANGGOTA DPRD**
3. NHK : **542736**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **805.000.000**

1. Tanah Seluas 1475 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. Tanah Seluas 740 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. Tanah Seluas 2528 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
6. Tanah Seluas 1200 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN Rp. 100.000.000
7. Tanah Seluas 945 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **580.000.000**

1. MOBIL, FORD RANGER 2.9 L Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000



3. MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
500.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 423.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 16.936.869

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.824.936.869

III. HUTANG Rp. 60.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.764.936.869

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.